

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh warga masyarakat menjadikan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga, serta dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Bentuk dari pemberdayaan yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik (Wadu et al., 2019). Keterlibatan warga masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan tersebut, namun tanpa kita sadari masih banyak ditemukan berbagai problema yang membelagu.

Di Asia Tenggara, sebuah penelitian dilakukan dengan fokus pada keterlibatan masyarakat, khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs). Di negara-negara tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi Keterlibatan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan sukses, namun model-model Barat harus diadaptasi agar lebih sesuai dengan budaya dan nilai-nilai lokal. Selain itu, komunitas di negara-negara berkembang dan berkembang yang menghadapi konflik bersenjata, bencana alam, atau penindasan politik menganggap kohesi komunitas sebagai hasil umum dari inisiatif keterlibatan sipil (James et al., 2020).

Laporan Keadaan Keterlibatan Dunia 2015, yang merupakan tinjauan global pertama mengenai kekuatan suara keterlibatan dalam membantu meningkatkan cara masyarakat diatur, mengacu pada bukti-bukti dari berbagai negara seperti Brasil, Kenya, Lebanon, dan Bangladesh. Laporan PBB menunjukkan bagaimana masyarakat menyumbangkan waktu, energi, dan keterampilan mereka untuk meningkatkan cara mereka mengatur dan terlibat di tingkat lokal, nasional, dan global. Tata kelola yang lebih baik di setiap tingkat merupakan prasyarat keberhasilan serangkaian target baru untuk pembangunan internasional di masa depan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang telah disepakati oleh PBB pada bulan September 2015 (Development, United Nations, n.d.)

Berfokus pada permasalahan ekonomi, keterlibatan masyarakat memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang ada dan membekali diri mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Sekelompok 37 sukarelawan dari seluruh dunia terlibat dalam kolaborasi intensif selama 4 bulan dengan [Departemen Urusan Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) (UN DESA) untuk memproses 386 survei penelitian yang dilakukan di 193 Negara Anggota PBB. untuk Survei [E-Government](#) PBB tahun 2014 (wikipedia, n.d.)

Sedangkan di Negara Indonesia isu keterlibatan dalam proses pembangunan ekonomi menjadi fenomena yang sangat penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan suatu negara atau wilayah. Fenomena ini mencakup berbagai elemen, termasuk partisipasi masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merencanakan, menjalankan, dan mengawasi inisiatif pembangunan ekonomi (Noor, 2011).

Di dalam dimensi pemerintahan, pemerintah desa merupakan Lembaga yang bersentuhan langsung dengan warga. Untuk Pemerintah Desa sendiri seharusnya menjadi sebuah hal yang lumrah, dengan adanya keterlibatan serta partisipasi warga masyarakat dalam pembangunan Desa akan mampu memberikan sebuah keberhasilan dalam sebuah program Pemerintah Desa. Adanya keterlibatan ini menjadi titik awal akan keberhasilannya suatu pemberdayaan masyarakat selain itu menjadi peluang yang besar bagi masyarakat dalam rangka mengetahui penyelenggaraan pemerintah secara nyata (Pangemanan, 2017)

Tingkat keterlibatan warga dalam pembangunan desa merupakan faktor yang memengaruhi program pembangunan dan perkembangan Desa. Dengan kata lain untuk mencapai tingkat keterlibatan yang lebih tinggi, penting bagi pemerintah Desa dan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga desa, menyediakan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan, dan menciptakan mekanisme komunikasi dan konsultasi yang efektif berdasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas Desa (Kushartono, n.d.)

Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dengan berbasis keterlibatan seluruh elemen warga masyarakat dengan mendirikan sebuah

Badan Usaha Milik Desa atau lebih sering disebut dengan BUMDes. Eksistensi BUMDes di tengah-tengah masyarakat sepatutnya wajib dikembangkan dan diwujudkan dalam sebuah Desa, serta memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong dan mengurangi angka kemiskinan di kalangan warga masyarakat Desa. Pengembangan model usaha dengan berbasis keterlibatan warga masyarakat menjadi sebuah hal yang seharusnya selalu dilakukan didalam setiap program pembangunan pemerintah Desa (Rahman & Rosmita, 2019).

Dalam dalam proses pembangunan ekonomi sangat kompleks dan berbeda-beda di berbagai negara dan wilayah. Untuk itu penting dalam memahami konteks lokal dan meningkatkan keterlibatan yang berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 145 Tahun 2022 (Republik Indonesia 2022). Keterlibatan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri salah satu aspek penting dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. BUMDes adalah entitas hukum yang dimiliki oleh desa atau kelurahan, dan peran serta warga desa dalam mengelola BUMDes sangat diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi di tingkat local.

Pendirian BUMDes sendiri saat ini terus berkembang dengan tambahan dorongan dari pemerintah pusat untuk mempercepat laju perekonomian di Indonesia. Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo juga menyatakan bahwa di Kabupaten Ponorogo sendiri telah memiliki BUMDes deengan total keseluruhan 281 unit BUMDes yang terbagi menjadi tiga klasifikasi yaitu 46 sebagai pemula, 152 berkembang dan 83 tergolong BUMDes Maju. Dari pengklasifikasian tersebut tentu ada beberapa hal yang menjadi alasan terkait keberhasilan maupun ketidak berhasilan dari BUMDes tersebut (PMD, n.d.)

Aspek penting dalam mencapai suatu keberhasilan BUMDes yaitu peran serta keterlibatan warga masyarakat dalam mengelola dan melaksanakan BUMDes. Dari pengelompokan BUMDes di atas dapat kita ketahui bahwasannya ada sebab dibalik kemunduran ataupun kemajuan progress sebuah BUMDes. Maka tak jarang pada pengelolaan BUMDes yang tergolong gagal berkembang terdapat banyak sekali permasalahannya.

Meliputi permasalahan elit local, konflik pengelola aset dengan pemerintah Desa, SDM yang tidak berkopeten, pendirian BUMDes tanpa musyawarah Desa dan tidak melalui kajian serta persiapan yang matang, kemudian ketidak adanya keterlibatan masyarakat luas ditambah dengan ketidak terbukaannya informasi seputar BUMDes membuat bumdes menjadi gagal bahkan hanya berdiri Namanya saja sebagai formalitas saja. (Dewi & Marsepa, 2021). Selain itu juga terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan, kurang jelasnya susunan kepengurusan BUMDes, ketidak jelasan visi dan misi, dan kurang tepatnya sasaran strategi perencanaan dan pengelolaan BUMDes tersebut.

Kemudian pada pengelolaan BUMDes berkembang namun belum berhasil disebabkan ketidak adanya dukungan, motivasi dari pihak pemerintah Desa untuk memberikan simpati dan apresiasi terhadap program-program yang direncanakan ataupun yang sudah terealisasi. Sehingga membuat pengelolaan BUMDes semakin menurun kinerjanya. Kurangnya keterlibatan warga masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, jika ada keterlibatan hanya segelintir orang saja yang memang mempunyai kepentingan. Dalam pengeloannya hanya menguntungkan sepihak saja, etah dari Elite politik desa maupun pembisnis (Putu Parendra Indra Devi et al., 2022)

Sedangkan pada kategori BUMDes yang maju dan berhasil terdapat keterlibatan warga dalam pengelolaan dan pelaksanaannya selai itu juga danya dukungan dari pemerintah Desa terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaannya, penggunaan strategi dan perencanaan yang matang di tambah lagi dengan usaha yang tepat sasaran membuat BUMDes semakin maju, adanya kesetabilan antara pengurus, pengelolaa dan pengawas (Pangemanan, 2017).

BUMDes juga dibangaun atas dasar inisiatif masyarakat desa dengan berdasar pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipasi dan emansipatif. Agar dapat membangun pengelolaan yang dilakukan secara professional, mandiri dan bertanggung jawab serta adanya keselarasan dengan sumber daya alam dan manusia yang ada di desa tersebut (Indrawati et al., 2020).Tentunya untuk mengoptimalkan hal tersebut juga harus melakukan pengamatan, perencanaan potesi apa yang dapat

dikembangkan, selanjutnya bisa melakukan pengelolaan yang dapat memberikan sebuah hasil bagi warga desa itu.

Dari ketiga kategori tersebut dapat disimpulkan dan yang menjadi permasalahan utama adalah terkait dengan keterlibatan warga masyarakat, serta peran serta Pemerintah Desa dalam memberikan sebuah dukungan atau penguatan keterlibatan dalam pengelolaan dan pelaksanaan BUMDes.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka dibutuhkan peran dari Pemerintah dalam memberikan penguatan atau dorongan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memastikan keberhasilan dan pertumbuhan berkelanjutan. Pemberian penguatan ini khususnya dari Kepala Desa, seluruh jajarannya ataupun organisasi-organisasi terkait untuk memberikan sebuah penguatan keterlibatan warga atau *civic engagement*. Adanya penguatan ini sangat penting dalam upaya meningkatkan keterlibatan warga masyarakat secara keseluruhan, Penguatan disini berupa pemberian dorongan kepada warga masyarakatnya untuk melakukan kegiatan yang produktif dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat.

Menurut (Skinner, 1938) proses pembentukan perilaku dengan mengendalikan dampak dari perilaku yang dilakukan dengan memberikan sebuah respon, sehingga dapat mengoreksi dan memberikan dukungan atas segala yang telah dilakukan. Pemberian penguatan disini merupakan salah satu dari bagian dalam pola kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk terlibat aktif, andil dalam berbagai kegiatan secara utuh tanpa adanya sebuah tekanan dari pihak manapun. Dalam pemberian penguatan juga dapat dilakukan dengan penguatan verbal dan non verbal yang mana setiap masing-masing jenis penguatan memiliki cara tersendiri (Usman, 2011) Yang memang tujuannya sama yaitu meningkatkan keterlibatan warga masyarakat secara utuh.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa penguatan keterlibatan warga masyarakat menjadi kekuatan penting untuk mendukung keberhasilan suatu program yang dilaksanakan. Dengan penerapan secara keseluruhan ketika keempat komponen ini mampu dikembangkan dengan baik tentunya akan menjadi tolak ukur dari keterlibatan warga masyarakat (Gusmadi, 2018). Peimplementasikan *civic*

engagement secara utuh akan memberikan sebuah dampak yang sangat luar biasa. Untuk itu keterlibatan warga negara menjadi kunci utama dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes.

Dua hal tersebut tidak boleh dipisahkan dalam melakukan kegiatan menuju arah tujuan. Dengan memerlukan sebuah unsur pendorong, maka disinilah peran Pemerintah Desa melalui Kepala Desa sangat diperlukan dengan harapan dapat memberikan sebuah dukungan positif kepada warga masyarakatnya dan dengan adanya dukungan ini akan memberikan sebuah dorongan yang baik. Pemberian penguatan ini memang pada dasarnya sangat penting, sesuai dengan kapasitas dan fungsinya. (Susetiawan et al., 2018)

Merujuk pada penelitian (Wadu et al., 2020) mengenai penguatan keterlibatan warga Negara dalam pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terhadap tujuan yang telah direncanakan. Selain itu upaya pemerintah untuk memberikan penguatan *civic engagement* dapat dilakukan penguatan verbal maupun nonverbal. Pemberian penguatan ini juga berfungsi sebagai pengembangan kesempatan, memotivasi dan kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses terhadap sumberdaya, sehingga dapat meningkatkan kapasitas serta kualitas masyarakat (Endah, 2020)

Dari berbagai kerangka permasalahan di atas tentu peneliti tertarik untuk melakukan kajian terkait bagaimana upaya pemerintah Desa dalam penguatan keterlibatan warga pada pengelolaan BUMDes. Di Kabupaten Ponorogo sendiri sudah memiliki beberapa BUMDes yang memang sudah maju, salah satunya di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. BUMDes ini bernama MARGO MULYO yang berdiri pada tahun 2018.

BUMDes MARGO MULYO ini sudah memiliki tata pengelolaan yang baik, mulai dari pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. Adanya transparansi terkait informasi serta keterlibatan warga masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan BUMDES sangat memberikan dampak berupa perubahan perekonomian masyarakat Desa Bringinan sendiri, mulai dari tersedianya potensi sumberdaya alam dan manusia, menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru bagi masyarakat, tersedianya kebutuhan rumah tangga

masyarakat, memaksimalkan hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

Unit usaha yang dikelolapun sangat beragam serta dapat menunjang perekonomian warga masyarakat Desa Bringinan. Adapun Usahanya berupa Usaha Kredit Rakyat, Usaha DepoIsi Ulang Air Mineral, Usaha Sumur Pertanian (Air Teriteregrasi), Usaha Toko (Bringinan Mart I & Bringinan Mart II) dan Usaha Agen POS BUMDes Margo Mulyo. Yang masing-masing dalam pengelolaan dengan melibatkan komponen warga masyarakat (Bringinan, 2022).

Dari studi pendahuluan telah peneliti lakukan di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, bedasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan dan kegiatan pelaksanaan BUMDes. Serta adanya penguatan dari Pemerintah Desa terutama dari kepala desa dan perangkatnya untuk mendorong keterlibatan warga masyarakat dari teori keterlibatan warga sangat terlihat pada kegiatan BUMDesnya.

Maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam kembali bagaimana peran Pemerintah Desa dalam melakukan penguatan keterlibatan dalam upaya pengelolaan dan pengembangan BUMDes yang maksimal. Tujuan dan implikasi dari penelitian ini nanati akan ditemukan metode pendekatan yang pas dalam mengembangkan BUMDes, sehingga bisa menjadi bagian rujukan dari penelitian yang akan mendatang.

Selain itu dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan contoh bagi Desa lain terkait dengan pemberian penguatan dalam melibatkan warga masyarakatnya dalam usaha peningkatan kesejahteraan dengan melalui BUMDes. Peneliti berharap dari adanya penelitian ini Desa-Desa Di kabupaten Ponorogo dapat mengembangkan potensi Sumber daya Alama dan Sumber daya Manusia melalui program BUMDes, dengan hal tersebut maka dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dalam bidang social ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana strategi penguatan Kepala Desa terhadap keterlibatan warga Desa Bringinan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
2. Bagaimana praktek keterlibatan warga masyarakat Desa Bringinan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bringinan.

C. Tujuan Penelitian

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan penelitian yang diantara lain sebagai berikut.

1. Mengetahui strategi penguatan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap keterlibatan warga Desa Bringinan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
2. Mengetahui praktek keterlibatan warga masyarakat Desa Bringinan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bringinan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca khususnya mengenai bagaimana keterlibatan warga Negara dalam pengelolaan badan Usaha Milik Desa, serta mengetahui factor dan pendorong dari keterlibatan warga masyarakat Desa. Serta tentunya untuk menambah wawasan dan disiplin Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Sebagai wawasan dan pengetahuan mahasiswa terkait dengan penguatan civic engagement pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDEs dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Universitas

Khususnya Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan khususnya di Desa Bringinan terkait penguatan *civic engagement* atau keterlibatan warga masyarakat desa dalam program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat memahami persoalan yang ada disekitarnya.

